

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

Raja Rizka Andraini

NPP. 32.0172

Asdaf Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: rajarizkaandraini1@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. H. Kusworo, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Indragiri Hulu Regency faces significant challenges in managing forest and land fires due to the dominance of highly flammable peatlands. Purpose:* This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in preventing forest and land fire disasters in Indragiri Hulu Regency. **Method:** *The research employs a descriptive qualitative method, drawing data from various sources, including the Regional Disaster Management Agency (KPBD), local oil palm plantation companies, and village communities. Result:* The findings indicate that collaboration among actors has been established through various activities such as joint preparedness rallies, public awareness campaigns, coordination meetings, and joint patrols. However, there is a need to strengthen the intensity of joint actions, coordination mechanisms, provision of infrastructure, and capacity-building through regular training. **Conclusion:** Collaborative governance in forest and land fire prevention in Indragiri Hulu Regency has been initiated. However, this study emphasizes the need for strengthening collaboration through more intensive joint activities, improved coordination, adequate infrastructure, and enhanced human resource competencies to increase the effectiveness of disaster prevention efforts. **Keywords:** Collaboration, Prevention, Forest and Land Fires

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kesulitan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karena sebagian besar wilayahnya didominasi oleh tanah gambut yang mudah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data dari berbagai unsur seperti Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD), perusahaan kebun sawit lokal, dan masyarakat desa. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor sudah terjalin melalui berbagai kegiatan seperti apel gabungan, sosialisasi, rapat koordinasi, dan patroli bersama, namun masih diperlukan penguatan dalam intensitas kegiatan bersama, koordinasi, serta pemenuhan sarana dan pelatihan sumber daya manusia. **Kesimpulan:** *Collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu telah berjalan. Namun, penelitian ini menekankan perlunya penguatan kolaborasi melalui kegiatan bersama yang lebih intensif, peningkatan koordinasi, pemenuhan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi sumber daya

manusia untuk meningkatkan keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kata kunci: Kolaborasi, Pencegahan, Kebakaran Hutan dan Lahan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia. Namun, keberadaan hutan menghadapi ancaman serius dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir terjadi setiap tahun. Nurjanah (2013) menjelaskan mengenai kebakaran hutan dan lahan merupakan kondisi api yang melanda lahan dan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dilanda api dan mengakibatkan kerugian terhadap nilai ekonomis lingkungan tersebut sehingga sifat fisik dan hayatinya juga mengalami perubahan langsung ataupun tidak langsung yang berdampak pada kurangnya fungsi lahan dan hutan sebagai unsur pendukung kehidupan yang berkelanjutan. Salah satu wilayah yang rentan terhadap bencana ini adalah Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau, yang didominasi oleh tanah gambut. Tanah jenis ini memiliki kandungan bahan organik yang tinggi dan mudah terbakar, terutama di musim kemarau, menjadikan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan semakin kompleks. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022–2024), Kabupaten Indragiri Hulu mencatat lonjakan signifikan baik dari segi jumlah kejadian maupun luas area terbakar. Data Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa hingga September 2024, lebih dari 751 hektare lahan terbakar, menjadikan kabupaten ini sebagai wilayah dengan kebakaran terluas di Provinsi Riau.

Kolaborasi lintas sektor menjadi pendekatan penting dalam mengatasi persoalan kompleks seperti kebakaran hutan dan lahan. Konsep *collaborative governance* menawarkan solusi dengan mengintegrasikan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam satu sistem kerja bersama. Kolaborasi dalam tata pemerintahan merupakan suatu pendekatan yang semakin diakui dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik (Nurnawati & Nurrahman, 2024). Penelitian oleh Peppy Nala Ratih, Ahmad Suprastiyo, dan Rupiarsieh (2024) di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat berhasil menekan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan, meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Syamsudin Lango Kukun, Rudi Subiyakto, dan Akhyary (2024) di Kabupaten Lembata mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti dialog tatap muka, kepercayaan antar aktor, dan pemahaman bersama menjadi kunci dalam keberhasilan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana alam. Kedua studi ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dan terstruktur semua pihak dalam menghadapi risiko bencana.

Berdasarkan konteks tersebut, penting untuk menelaah bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu. Pemerintah daerah melalui KPBD telah menggagas beberapa bentuk kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat, namun efektivitasnya belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kolaborasi tersebut, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan strategi penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan sesuai kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Sutiyo dan Eva (2023:83) menjelaskan bahwa pencegahan bencana berisi upaya menghambat terjadinya bencana, atau mencegah supaya bencana tersebut tidak menimbulkan kerugian masyarakat. Dengan mengkaji lebih dalam praktik kolaborasi yang terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

model kolaboratif yang adaptif dan efektif untuk diterapkan pada wilayah rawan bencana serupa di Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun kebijakan dan program pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui KPBD, kenyataannya kasus kebakaran masih terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang ada belum mampu menyentuh akar permasalahan, khususnya terkait efektivitas kolaborasi antara pemangku kepentingan. Pemerintah masih terlihat dominan dalam pelaksanaan program, sementara pelibatan sektor swasta dan masyarakat belum optimal. Padahal, teori *collaborative governance* menekankan pentingnya kesetaraan peran dan partisipasi aktif dari seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik.

Kesenjangan lainnya terlihat dari belum terintegrasinya mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan antara KPBD, perusahaan swasta seperti perkebunan kelapa sawit, dan masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Aktivitas kolaborasi seperti apel gabungan dan sosialisasi memang telah dilakukan, namun intensitas dan kedalaman kerja sama tersebut masih bersifat formal dan belum menyentuh aspek strategis seperti perencanaan bersama, pembagian tanggung jawab, dan pengelolaan risiko jangka panjang. Hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan terpadu dan keterbatasan fasilitas pendukung, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara komprehensif.

Selain itu, penelitian sebelumnya yang mengkaji *collaborative governance* dalam konteks penanggulangan bencana masih banyak berfokus pada daerah-daerah yang tidak memiliki karakteristik ekosistem gambut seperti Indragiri Hulu. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengisi celah pengetahuan mengenai bagaimana *collaborative governance* dapat diterapkan secara lebih adaptif dan kontekstual di wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi. Penelitian ini sekaligus menjadi refleksi kritis terhadap implementasi konsep kolaborasi pemerintah yang masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan dampak sementara kolaborasi yang efektif di lapangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didorong oleh temuan dari sejumlah studi terdahulu. Peppy Nala Ratih, Ahmad Suprastiyo, dan Rupiarsieh (2024) melakukan penelitian mengenai *collaborative governance* dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bojonegoro, yang menunjukkan bahwa keterlibatan semua pihak secara aktif mampu menekan jumlah kebakaran, meski keterbatasan sarana dan SDM tetap menjadi hambatan. Syamsudin Lango Kukun dan Rudi Subiyakto, dan Akhyary (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Lembata mengidentifikasi bahwa komitmen, kepercayaan, serta dialog tatap muka menjadi pilar penting kolaborasi yang efektif. Selanjutnya, Alfina Putri Cahyaningrum dan Retna Hanani, dan Kismart (2024) melakukan kajian di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, dan menemukan bahwa pelibatan masyarakat yang masih minim serta lemahnya koordinasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Maylani, dan Dadang Mashur (2019) yang berjudul *Collaborative Governance dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut* yaitu hasil penelitian ini bahwa *collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis belum maksimal dan ada beberapa indikator yang belum maksimal, yaitu : tujuan, kompromi dan komunikasi, sementara demokrasi kesetaraan, kekuatan dan

kepercayaan dan tekad, komitmen dan stamina telah berjalan dengan baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Melvina O Damani, dan Amy Yayuk Sri Rahayu (2021) melakukan penelitian mengenai tata kelola kolaboratif sudah mulai tergambar dalam kolaborasi Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau, namun diperlukan beberapa pemenuhan di beberapa variabel kolaborasi yang direkomendasikan dengan meningkatkan dialog tatap muka untuk mengelaborasi aktivitas pencegahan yang sudah ada, pengembangan pemahaman bersama dalam menetapkan ukuran keberhasilan aktivitas pencegahan, dan mempertahankan komitmen serta rasa saling percaya. Pada penelitian oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) dalam jurnalnya *An Integrative Framework for Collaborative Governance* menyusun kerangka kerja kolaboratif yang menekankan pentingnya dinamika interaksi antar aktor, kepercayaan, dan kepemimpinan adaptif dalam menyelesaikan masalah publik, termasuk dalam penanganan bencana. Sedangkan Dody Ruswandi, Sumartono, Syamsul Maarif dan Andy Fefta Wijaya (2021) dalam jurnalnya *Strategic Analysis of Collaborative Governance for Disaster Management on Forest and Land Fires in Indonesia* menyampaikan bahwa Visi dan misi kebijakan publik penanggulangan bencana diperlukan untuk penyempurnaan dan penyediaan informasi kepada para pemangku kepentingan terkait regulasi dan sanksi dalam penanggulangan bencana alam serta menghasilkan revisi regulasi yang relevan bagi lembaga negara sebagai pejabat publik dalam membuat regulasi penanggulangan bencana di Indonesia. kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, swasta, dan publik memiliki berbagai kekurangan, seperti kolaborasi yang kurang aktif, sifatnya yang patuh, dan stabilitas kerja samanya yang tidak stabil. Selanjutnya, hasil temuan oleh Ardhi Tomiyansyah (2024) dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Forest and Land Fire Control Policies in Ogan Komering Ilir Regency* yaitu ada kecenderungan sebagian pihak nonpemerintah yang menginginkan diskresi preferensi keuntungan, sehingga kolaborasi secara keseluruhan memiliki risiko, yaitu reputasional dan ketergantungan pada swasta. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rusdijman Soemaatmadja, Tjahja Supriatna, Hyronimus Rowa, dan Kusworo (2020) menunjukkan hasil temuan bahwa implementasi kebijakan wawasan kebangsaan masih belum berlangsung baik secara kolaboratif, sehingga banyak menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh faktor sumber daya manusia, dan anggaran. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulhadi, Andi pitono dan Ella L. Wargadinata (2023) menunjukkan hasil temuan bahwa proses kolaborasi yang dibangun sudah cukup baik berdasarkan dimensi Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian yang dilakukan yakni collaborative governance dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu yang sudah berjalan namun belum efektif, metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Peppy Nala Ratih, Ahmad Suprastiyo, dan Rupiarsieh (2024) yaitu terletak pada fokus penelitian dan lokasi kajiannya dimana penelitian yang dilaksanakan oleh Peppy Nala Ratih dkk berfokus pada *collaborative governance* dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian pada penelitian Syamsudin Lango Kukun dan Rudi Subiyakto, dan Akhyary (2024) terdapat perbedaan pada fokus penelitian dan lokasi kajiannya yaitu penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya,

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfina Putri Cahyaningrum dan Retna Hanani, dan Kismart (2024) terletak pada fokus penelitian dan lokasi kajiannya yaitu penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Maylani, dan Dadang Mashur (2019) yaitu lokasi kajiannya di Kabupaten Bengkalis dan menggunakan teori proses kolaborasi antar organisasi oleh Huxham dan Siv Vangen yaitu adan enam proses : tujuan, kompromi; komunikasi; demokrasi dan kesetaraan; kekuatan dan kepercayaan; tekad komitmen, dan stamina. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Melvina O Damani, dan Amy Yayuk Sri Rahayu (2021) terletak pada fokus penelitian yaitu berfokus pada kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ditinjau dari model tata kelola kolaboratif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa kolaborasi dapat terjadi pada 5 tahap yaitu dialog antar muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, pemahaman bersama, dan dampak sementara. Namun, peneliti hanya menggunakan 3 dimensi dari 5 dimensi, dikarenakan menurut peneliti 3 dimensi yang digunakan lebih relevan pada penelitian ini yaitu membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan dampak sementara.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai *collaborative governance* dalam Pencegahan Bencana Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena *collaborative governance* dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan. Menurut Moleong (2018:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, serta disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk memaparkan fakta dan karakteristik dari objek atau fenomena tertentu secara tepat sesuai dengan kenyataan.

Untuk memperoleh data yang valid dan reliabel, peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik validasi data. Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dalam bentuk triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan terpercaya.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam melakukan penumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang yang terdiri dari Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Seksi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Tata Usaha Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Dosen Institut Teknologi Bisnis Indragiri Hulu, Manajer PT. Sinar Belilas Perkasa, Sekretaris Desa Payarumbai, dan Badan Perwakilan Desa Payarumbai. Adapun analisisnya menggunakan teori koordinasi yang digagas oleh Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan bahwa *collaborative governance* terdapat

beberapa tahap yaitu membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan dampak sementara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *collaborative governance* dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu yang masih belum efektif menggunakan teori dari Ansell dan Gash yang menyatakan bahwa *collaborative governance* ada beberapa tahap yaitu membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan dampak sementara. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sebagai berikut.

3.1 Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun kepercayaan merupakan fondasi awal dan paling penting dalam pelaksanaan kolaborasi antara KPBD Kabupaten Indragiri Hulu, pihak swasta (PT. Sinar Belilas Perkasa), dan masyarakat (tokoh adat, perangkat desa, dan relawan seperti Masyarakat Peduli Api). Kepercayaan ini terbentuk melalui komunikasi yang intensif dan keterbukaan antar pihak. Intensitas pertemuan dalam forum rapat koordinasi, apel kesiapsiagaan, sosialisasi, dan patroli gabungan menjadi wujud nyata dari komunikasi tersebut. Hubungan yang dibangun secara berkelanjutan ini menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat sinergi dalam kegiatan pencegahan kebakaran. Melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2025, Bapak Fikri Gushendri, S.STP, M.Si selaku Kepala Seksi Prabencana KPBD Kabupaten Indragiri Hulu mengatakan bahwa

“Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalin komunikasi yang intensif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang wilayah tempat tinggalnya rawan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu dari kegiatan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh KPBD dan dilaksanakan minimal setahun sekali sebagai edukasi untuk melakukan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan agar bencana tersebut bisa dicegah sedini mungkin dan mengedukasi bagaimana prosedur yang bisa dilakukan masyarakat apabila bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi”.

Bentuk komunikasi intensif yang ditemukan tidak hanya dalam forum resmi seperti rapat koordinasi, tetapi juga melalui komunikasi informal di lapangan, misalnya ketika tim KPBD dan relawan desa bertemu saat patroli atau pemadaman. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi tidak berhenti hanya pada saat-saat formal, tetapi terus berlanjut dan menjadi budaya kerja bersama. Salah satu keberhasilan yang dicapai dari komunikasi intensif ini adalah terbentuknya kesepahaman dalam pelaksanaan pembagian peran dan tanggung jawab antar pihak saat musim kemarau tiba, di mana frekuensi kebakaran meningkat.

Dari sisi keterbukaan, pihak KPBD secara terbuka menyampaikan keterbatasan dalam personel dan sarana-prasarana yang dimiliki, sehingga meminta dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Begitu pula, perusahaan sawit setempat terbuka mengenai area rawan di sekitar wilayahnya dan menyediakan peralatan pemadam yang dapat digunakan secara bersama. Sikap transparan ini tidak hanya membentuk rasa saling percaya, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif bahwa keberhasilan pencegahan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Namun demikian, meskipun kepercayaan sudah mulai terbentuk dengan baik, penelitian ini juga mengungkap bahwa belum seluruh elemen masyarakat terlibat aktif, terutama di desa-desa yang jauh dari pusat koordinasi. Untuk itu, peneliti merekomendasikan pentingnya pendekatan kultural dan peningkatan komunikasi

berbasis lokal agar kepercayaan yang dibangun dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah rentan bencana.

3.2 Pemahaman Bersama (Shared Understanding)

Pemahaman bersama menjadi dimensi penting dalam menyatukan perspektif berbagai aktor yang memiliki latar belakang dan kepentingan berbeda dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menemukan bahwa proses penyamaan tujuan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penyuluhan bersama, rapat koordinasi lintas sektor, dan diskusi strategis dalam apel gabungan. Dalam kegiatan-kegiatan ini, KPBD bertindak sebagai pemimpin kolaborasi yang mengarahkan tujuan bersama dalam misi pencegahan bencana dan mengharmonisasikan kepentingan pihak swasta serta masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Kepala KPBD Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, bapak Mulyadi, S.Sos pada tanggal 15 Januari 2025 bahwa “Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu selalu melakukan apel pengecekan personil dan apel kelengkapan sarana dan prasarana di mana apel ini dilaksanakan setiap awal musim kemarau. Pembina apel diambil langsung oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga apabila terdapat kekurangan oleh salah satu pihak dapat dicari jalan keluar bersama untuk diselesaikan sehingga bencana kebakaran hutan ini dapat kita cegah sedini mungkin”.

Adanya persamaan tujuan secara eksplisit terlihat dari kesediaan semua pihak untuk menandatangani komitmen bersama dalam forum rapat koordinasi tahunan. Tujuan tersebut mencakup upaya deteksi dini melalui patroli, pemetaan kawasan rawan, serta komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dalam wawancara, pihak perusahaan menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi ini bukan hanya menyelamatkan lingkungan tetapi juga berdampak langsung pada kelangsungan operasional usaha mereka.

Selain menyamakan tujuan, penyatuan pemikiran juga ditemukan dalam proses penyusunan rencana kontingensi daerah. KPBD membuka ruang bagi masukan dari akademisi dan tokoh masyarakat desa yang mengenal langsung karakteristik wilayah masing-masing. Pendekatan ini memperkaya pemahaman lintas sektor dan menjadikan kebijakan yang disusun lebih kontekstual dan operasional. Peneliti mencatat bahwa penyatuan pemikiran ini menumbuhkan rasa saling memiliki terhadap program kolaborasi yang berjalan.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam mempertahankan konsistensi pemahaman bersama. Penelitian mengidentifikasi bahwa pemahaman ini bisa melemah apabila tidak diperkuat dengan pertemuan reguler dan dokumentasi hasil kesepakatan. Oleh karena itu, disarankan agar KPBD membuat sistem pendokumentasian hasil-hasil kolaborasi dalam bentuk laporan terbuka dan menyelenggarakan forum evaluasi triwulanan agar pemahaman bersama tetap relevan dan menyatu dalam setiap perubahan kondisi lapangan.

3.3 Dampak Sementara (Intermediate Outcomes)

Dampak sementara merupakan hasil awal dari proses kolaborasi yang berlangsung, yang tidak hanya memberi semangat kepada para aktor yang terlibat tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa kolaborasi membawa hasil konkret. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan patroli gabungan, apel kesiapsiagaan tahunan, dan penyuluhan terpadu di desa-desa rawan menjadi indikator dari dampak sementara yang positif. Melalui kegiatan-kegiatan ini, terlihat adanya penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengenali titik rawan dan melakukan tindakan cepat sebelum kebakaran

meluas.

Umpan balik positif diperoleh dari berbagai pihak melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam patroli mandiri dan laporan kebakaran lebih dini yang diterima oleh KPBD. Misalnya, data tahun 2024 menunjukkan bahwa laporan masyarakat tentang titik api meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa kesadaran dan respons masyarakat mulai tumbuh, yang merupakan salah satu tujuan utama dari collaborative governance. Pemerintah daerah pun menanggapi hal ini dengan memberikan penghargaan kepada desa-desa yang aktif berpartisipasi dalam pelaporan dini. Dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1
Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Luas Kasus (Ha)
2022	29	73,31
2023	87	578,14
2024	58	751,42

Sumber : KPBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025

Data di atas merupakan data kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2022 hingga bulan September 2024. Dapat dilihat setiap tahun kasus kebakaran hutan dan lahan terus meningkat. Jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Bahkan pada tahun 2024 jumlah kasus yang tercatat meningkat sangat signifikan pada luas lahan yang terbakar. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, tetapi juga luas area yang terbakar juga mengalami peningkatan yang sangat drastis. Ini menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi semakin meluas dan sulit diatasi.

Tanggung jawab yang dimiliki bersama merupakan salah satu faktor penting juga dalam hubungan kolaborasi. Tanggung jawab ini seperti nilai kebersamaan yang timbul dari masing-masing pihak yang terlibat. Dan tanggung jawab ini juga seperti kesadaran yang dimiliki untuk ikut membantu dalam upaya kolaborasi yang telah dibuat dalam mengatasi suatu permasalahan. Untuk hasil sementara dari berjalannya kolaborasi juga dapat dilihat melalui aksi yang menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab bersama antar masing-masing pihak. Seperti pada pihak perangkat daerah yang telah memberikan keputusan bahwa adanya hubungan kerja sama yang harus terjalin antara pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi, S.Sos selaku Kepala KPBD pada tanggal 15 Januari 2024 mengatakan bahwa

“Bentuk kolaborasi dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan ini dituangkan dalam SK TRC (Tim Reaksi Cepat) Kabupaten Indragiri Hulu. Pihak terlibat yang tercantum dalam SK TRC memiliki tanggung jawab dalam penanganan bencana pada lokasi wilayah terdampak, lokasi pengungsian, dan wilayah sekitar lokasi terdampak yang aman dari ancaman bencana yang diperkirakan memiliki kemampuan untuk membantu pelaksanaan penanganan darurat bencana”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dituangkan dalam SK TRC yang di mana pembina

TRC adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dan SK TRC ini ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga pihak-pihak yang terlibat telah dijelaskan tugasnya dan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab.

Selain itu, dampak sementara juga terlihat dari meningkatnya kolaborasi logistik dan operasional antara KPBD dan pihak perusahaan. Dalam beberapa kasus pemadaman yang terjadi di desa Payarumbai dan sekitarnya, alat berat dan kendaraan perusahaan digunakan secara bersama, menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab antar pihak mulai terwujud dalam tindakan nyata.

Namun demikian, peneliti mencatat bahwa belum semua wilayah mengalami dampak yang merata. Beberapa desa di wilayah barat dan perbatasan mengalami keterbatasan akses informasi, peralatan, dan pelatihan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari evaluasi dampak sementara, penting bagi KPBD untuk menyusun indikator keberhasilan jangka pendek secara lebih detail dan menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kolaborasi yang ada.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya kerja sama antara pemerintah daerah (KPBD), pihak swasta (perusahaan perkebunan sawit), dan masyarakat desa. Bentuk kolaborasi tersebut tampak melalui pelaksanaan apel gabungan, patroli terpadu, rapat koordinasi, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas kolaborasi ini masih dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya sarana prasarana, terbatasnya sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan bencana.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Peppy Nala Ratih, Ahmad Suprastiyo, dan Rupiarsieh (2024) di Kabupaten Bojonegoro, yang juga menemukan bahwa meskipun kolaborasi antar pemangku kepentingan telah berlangsung efektif, keterbatasan dalam hal SDM dan infrastruktur tetap menjadi penghambat utama. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Syamsudin Lango Kukun, Rudi Subiyakto, dan Akhyary (2024) di Kabupaten Lembata, yang menekankan pentingnya komponen kepercayaan, komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama dalam membangun kolaborasi yang kokoh. Dalam penelitian di Indragiri Hulu, komponen tersebut mulai terlihat terbangun, meskipun belum merata dan masih memerlukan penguatan.

Sementara itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Alfina Putri Cahyaningrum, Retna Hanani, dan Kismart (2024) di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, yang menyoroti pentingnya *intermediate outcomes* atau hasil sementara dalam proses kolaborasi. Penelitian di Indragiri Hulu menunjukkan adanya umpan balik positif berupa peningkatan koordinasi dan keterlibatan swasta, yang menjadi bentuk *small wins* dalam proses panjang pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Namun, sebagaimana halnya penelitian terdahulu, partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menguatkan argumen yang diajukan oleh Ansell dan Gash (2007) bahwa *collaborative governance* adalah strategi yang menjanjikan dalam menangani isu publik yang kompleks seperti bencana. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana para aktor mampu membangun kepercayaan, menyamakan visi, serta menjaga komitmen dan komunikasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi hasil-hasil sebelumnya, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang dinamika kolaborasi dalam

konteks kebakaran hutan dan lahan di wilayah dengan karakteristik tanah gambut seperti Kabupaten Indragiri Hulu.

IV. KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu telah menunjukkan inisiatif positif meskipun belum sepenuhnya optimal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya KPBD, dengan pihak swasta dan masyarakat telah terbangun melalui berbagai kegiatan seperti apel siaga bersama, patroli gabungan, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat dalam deteksi dini titik api. Dimensi membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil sementara dari kolaborasi telah menunjukkan kemajuan yang mendorong terwujudnya kerja sama lintas sektor. Meskipun demikian, proses kolaboratif ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya forum komunikasi berkelanjutan, serta distribusi sarana prasarana yang belum merata.

Dengan memperkuat intensitas interaksi antar pihak, meningkatkan pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia, serta menyusun sistem evaluasi kolaboratif yang transparan dan berbasis data, maka *collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat menjadi solusi jangka panjang yang efektif di daerah dengan karakteristik lahan gambut seperti Kabupaten Indragiri Hulu. Keberhasilan kolaborasi ini tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah, tetapi juga pada kesediaan seluruh aktor untuk berbagi peran dan tanggung jawab secara adil, dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Cahyaningrum, A. P., Hanani, R., & ... (2024). Proses Collaborative Governance Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. *Journal of Public Policy*
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/45122%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/45122/31394>
- Damanik, M. O., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 44–54.
<https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5922>

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Lango Kukun, S., Subiyakto, R., & Akhyary, E. (2024). Collaborative Governance Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 53–61. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v5i1.8476>
- Maylani, T., & Mashur, D. (2019). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 105. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.105-110>
- Nala, P., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh, R. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bojonegoro. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 12(1), 12. <https://doi.org/10.31764/jiap.v12i1.20211>
- Nurnawati, E., & Nurrahman, A. (2024). Analisis Collaborative Governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh BPJS Kesehatan , BPJamsostek , Kantor Imigrasi , Kejaksaan Negeri , PT . PLN , dan Polresta Namun dalam implementasinya , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- Ruswandi, D., Sumartono, S., Maarif, S., & Wijaya, A. F. (2021). Strategic Analysis of Collaborative Governance for Disaster Management on Forest and Land Fires in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(163), 1707–1716. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.193>
- Soemaatmadja, R., Supriatna, T., Rowa, H., & Kusworo. (2020). Kebijakan Wawasan Kebangsaan Dan Penanganan Konflik Sosial Dalam Prespektif Collaborative Governance Di Kabupaten Pandeglang. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.54783/japp.v3i2.108>
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Tomiyansyah, A. (2024). Collaborative Governance in Forest and Land Fire Control Policies in Ogan Komering Ilir Regency. *KnE Social Sciences*, 2024, 160–179. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i18.16347>
- Zulhadi, Pitono, A., & Wargadinata, E. L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 1244–1255.